

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KOTA SURABAYA

TAHUN 2025



PEMERINTAH
KOTA SURABAYA



DAFTAR ISI

COVER.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Sistematika Penulisan	5
II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan.....	6
III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	23
3.1. Program dan Kegiatan	23
IV. Penutup.....	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Surabaya 2025 merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan untuk mengadaptasi dan mengantisipasi dinamika perubahan yang terjadi dalam lingkungan pemerintahan dan masyarakat di Kota Surabaya. Rencana kerja yang sudah ada sebelumnya telah dijalankan dengan sebaik mungkin, namun kesadaran akan perlunya adaptasi dan perbaikan menjadi sebuah keharusan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan masa depan.

Sebagai salah satu institusi pemerintahan yang berperan penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, Inspektorat Kota Surabaya merasa perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap rencana kerja yang telah dirumuskan sebelumnya. Perubahan kebijakan, pergeseran kebutuhan masyarakat, dan perubahan paradigma dalam pengawasan pemerintahan adalah beberapa faktor yang mendasari pentingnya penyusunan ulang rencana kerja ini.

Dalam upaya untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat, Inspektorat Kota Surabaya berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan akan mampu memberikan panduan dan arah yang jelas bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien.





Partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terkait juga akan diupayakan dalam proses penyusunan dokumen ini. Keterlibatan para pemangku kepentingan akan memberikan masukan berharga serta mendukung kesepahaman bersama terkait dengan prioritas dan target yang ingin dicapai. Dokumen Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Kota Surabaya 2025 ini tidak hanya berfungsi sebagai acuan internal, tetapi juga sebagai sarana berkomunikasi dengan publik mengenai arah dan visi Inspektorat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya perubahan rencana kerja ini, Inspektorat Kota Surabaya dapat semakin efektif dalam memberikan kontribusi positif bagi pemerintahan kota serta mampu mencapai kinerja yang lebih baik lagi demi kepentingan masyarakat dan kemajuan kota Surabaya secara keseluruhan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 adalah untuk:

1. Menyediakan acuan resmi bagi Inspektorat Kota Surabaya dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD; dan
2. Menyediakan tolok ukur bagi evaluasi dan penilaian kinerja Inspektorat Kota Surabaya.

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan Renja PD Tahun 2023 adalah untuk:

1. Memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi Amanah;





2. Memberikan dasar bagi pengambilan keputusan untuk perbaikan dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai visi dan misi;
3. Memberikan masukan untuk memperbaiki perencanaan.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata



Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 – 2045;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 69);



11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025;
12. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
13. Keputusan Walikota No 188.45/267/436.1.2/2021 Tentang Nomenklatur Dan Tugas Sub Koordinator Pada Inspektorat Kota Surabaya.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

II. Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan

III. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 3.1. Program dan Kegiatan

IV. Penutup





BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenan

Evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Kota Surabaya bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Inspektorat Kota Surabaya dalam melaksanakan program dan kegiatannya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada Renja Tahun 2025.

Pada bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Kajian (review) Inspektorat adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan targetnya Tahun 2025 sebesar 100%, realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 98,38%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN. Target Tahun 2025 yaitu 100%. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN.





Target Tahun 2025 yaitu 40 orang/bulan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 42 orang/bulan

- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Serta Ketersediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor. Target Tahun 2025 yaitu 100%. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan. Target tahun 2025 sebanyak 2 Paket. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebanyak 2 Paket.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. Target Tahun 2025 yaitu 100%. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 100%.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan. Target Tahun 2025 yaitu 12 Laporan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebanyak 2 Laporan.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator kinerja yang pertama Persentase Penanganan Kasus Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan targetnya Tahun 2025 sebesar 100% dan realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 100%, yang kedua Persentase Rekomendasi Pengawasan Internal Yang Ditindaklanjuti Perangkat Daerah dengan targetnya Tahun 2025 sebesar 100% dan tingkat realisasi triwulan I tahun





2025 mencapai 100%, yang ketiga Pemenuhan Rekomendasi Pengawasan Eksternal Yang Difasilitasi dengan targetnya Tahun 2025 100% dan tingkat realisasi triwulan I tahun 2025 mencapai 0%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan indikator kinerja yang pertama Jumlah Lembaga Yang Dilakukan Pengawasan Internal dengan Target Tahun 2025 yaitu 65 Lembaga dan Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 11 Lembaga, indikator kinerja yang kedua Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev dengan Target Tahun 2025 yaitu 20 Rekomendasi, Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Rekomendasi, indikator kinerja yang ketiga Jumlah dokumen hasil reviu laporan kinerja dan keuangan dengan Target Tahun 2025 yaitu 17 Dokumen, Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 1 Dokumen.
 - Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP. Target Tahun 2025 yaitu 20 Rekomendasi. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Rekomendasi.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah. Target Tahun 2025 yaitu 65 Laporan. Realisasi Triwulan I Tahun 2025 sebesar 11 Laporan.





- Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan. Target Tahun 2025 yaitu 7 Laporan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Laporan.
- Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja. Target Tahun 2025 yaitu 10 Laporan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 1 Laporan.
- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah Yang Dilakukan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Target Tahun 2025 yaitu 20 Lembaga. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 2 Lembaga.
 - Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah. Target Tahun 2025 yaitu 5 Laporan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 1 Laporan.
 - Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dengan indikator kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu. Target Tahun 2025 yaitu 20 Laporan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 2 Laporan.
- 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan indikator kinerja yang pertama Persentase PD Yang Dilakukan Pendampingan Dan Asistensi Terkait Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Tahun 2025 100% dan tingkat realisasi triwulan I tahun 2025 mencapai 0,00%, indikator kinerja yang kedua Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pengawasan Yang Ditindaklanjuti dengan Target Tahun 2025 100% dan





tingkat realisasi triwulan I tahun 2025 mencapai 100%, indikator kinerja yang ketiga Persentase PD Yang Dilakukan Pendampingan Dan Asistensi Terkait Reformasi Birokrasi dengan Target Tahun 2025 100% dan tingkat realisasi triwulan I tahun 2025 mencapai 11,48%. Capaian Program tersebut dicapai melalui kegiatan dan sub kegiatan berikut:

- a. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan dengan Target Tahun 2025 yaitu 4 dokumen, Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 1 dokumen.
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun. Target Tahun 2025 yaitu 4 Rekomendasi. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Rekomendasi.
 - Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan dengan indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun. Target Tahun 2025 yaitu 4 Rekomendasi. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 1 Rekomendasi.
- b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi dengan indikator kinerja yang pertama Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target Tahun 2025 yaitu 65 Laporan, Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Laporan. Yang





kedua Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas dengan Target Tahun 2025 yaitu 47 Kali, Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 3 Kali.

- Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Target Tahun 2025 yaitu 25 Kegiatan. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 3 Kegiatan.
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas. Target Tahun 2025 yaitu 12 Perangkat Daerah. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi. Target Tahun 2025 yaitu 10 Perangkat Daerah. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Perangkat Daerah.
- Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator kinerja Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah. Target Tahun 2025 yaitu 65 Perangkat Daerah. Realisasi triwulan I tahun 2025 sebesar 0 Perangkat Daerah. Adapun





rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 2.1. berikut:





Tabel 2.1.

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
6		Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah																										
6.01		Inspektorat Daerah																										
6.01.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota					31,555,889		23,228,932		27,047,087		5,070,227		-		-		-			5,070,227		5,070,227		16,07%
							Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [715]	100%			97.88%		100%		98.38%		-		-		-			98.38%		98.38%		98.38%
6.01.01.2.02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27,567,135				24,441,630		4,774,577		-		-		-			4,774,577		4.774.577		17.32%
							Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [819]	100%			100%		100%		100%		-		-		-			100%		200%		200.00%
6.01.01.2.02.001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1489]			27,567,135				24.441.630		4,774,577		-		-		-			4,774,577		4.774.577		17,32%
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4967]	42 Orang / Bulan		42 Orang / Bulan		40 Orang / Bulan		42 Orang / Bulan		-		-		-		-		42 Orang / Bulan		84 Orang / Bulan		100.00%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



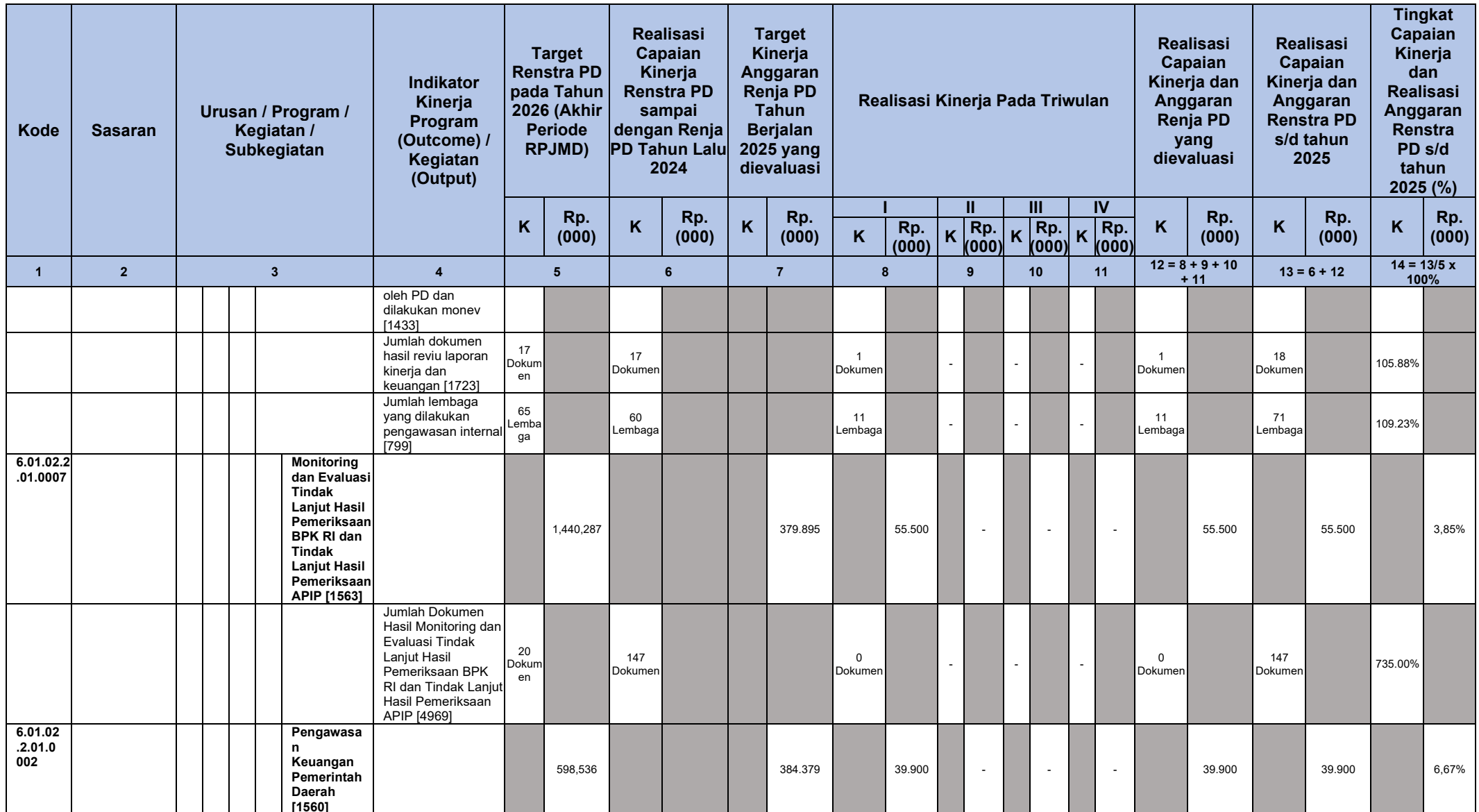
Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
06.01.01.2.06					Administrasi Umum Perangkat Daerah		802,437				712,327		25,324		-		-		-		25,324		25,324		3.16%	
						Persentase Pemenuhan Penyediaan dan perlengkapan kantor [820]	100%		100%		100%		100%		-		-		-		100 %		200 %		200.00%	
6.01.01.2.06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1559]		802,437				712.327		25,324		-		-		-		25.324		25.324		3,16%	
						Jumlah Paker Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4973]	100%		100%		100%		2 Paket		-		-		-		2 Paket		5 Paket		150.00%	
6.01.01.2.08					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		802,437				1,893,130		270,325		-		-		-		270,325		270,325		8.48%	
						Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah [822]	2 Paket		3 Paket		2 Paket		100%		-		-		-		100 %		200 %		200.00%	
6.01.01.2.08.0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum		3,186,316				1.893.130		270,325		-		-		-		270.325		270.325		8,48%	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
						Kantor [1602]																					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4974]	12 Laporan		12 Laporan			2 Laporan	-	-	-	-	2 Laporan		14 Laporan			100.00%				
6.01.02						Program Penyelenggaraan Pengawasan			2,764,043			2,418,017		295,800	-	-	-	-	295,800		295,800			10,70%			
							Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah [691]	100%		100%			0.00%	-	-	-	-	0.00 %		0.00 %			0.00%				
							Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu [693]	100%		100%			100.00%	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %			100.00%				
							Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi [692]	100%		100%			100.00%	-	-	-	-	100.00 %		100.00 %			100.00%				
6.01.02.2.01						Penyelenggaraan Pengawasan Internal			2,115,113			1,526,862		175,800	-	-	-	-	175,800		175,800			8.31%			
							Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti	20 Rekomendasi		147 Rekomendasi			0 Rekomendasi	-	-	-	-	0 Rekomendasi		147 Rekomendasi			735.00%				





RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
							Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah [4968]	65 Laporan		60 Laporan				11 Laporan		-	-	-	-	11 Laporan		71 Laporan		92.31%			
6.01.01.2.08.004						Reviu Laporan Keuangan [3287]			36,351			422.240		40.500		-	-	-	-	40.500		40.500		111,41%			
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan [4977]	7 Laporan		7 Laporan			0 Laporan		-	-	-	-	0 Laporan		7 Laporan		100.00%				
6.01.02.2.01.003						Reviu Laporan Kinerja [3286]			39,940			340.348		39.900		-	-	-	-	39.900		39.900		99,90%			
							Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja [4976]	10 Laporan		10 Laporan			1 Laporan		-	-	-	-	1 Laporan		11 Laporan		100.00%				
6.01.02.2.02						Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			648,930			891,155		120,000		-	-	-	-	120,000		120,000		18.49%			
							Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu [802]	20 lembaga		20 lembaga				2 Lembaga		-	-	-	-	2 lembaga		22 lembaga		110.00%			
6.01.02.2.02.001						Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah [3446]			35,956			314.326		62.300		-	-	-	-	62.300		62.300		173,27%			



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%						
							Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara / Daerah yang Ditangani [4981]	5 Laporan		5 Laporan			1 Laporan		-		-		-		1 Laporan		6 Laporan		100.00%				
6.01.02.2.02.0002						Pengawasan dengan Tujuan Tertentu [1566]			612,973			576.829		57.700		-		-		-		57.700		57.700		9,41%			
						Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu [4972]	20 Laporan		20 Laporan				2 Laporan		-		-		-		2 Laporan		22 Laporan		100.00%				
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				1,127,801			2,321,071		274,300		-		-		-		274,300		274,300		24,32%			
						Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi [1583]	100%		100%				100.00%		-		-		-		100.00%		100.00%		100.00%				
						Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah [695]	100%		100%				11.48%		-		-		-		11.48%		11.48%		11.48%				
						Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan	100%		100%				0.00%		-		-		-		0.00%		0.00%		0.00%				



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)		Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				4		5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
						yang ditindaklanjuti [694]																					
6.01.03.2.01					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				522,100				532,418		83,800		-		-		-		83,800		83,800		16.05%
					Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang dirumuskan [800]			4 Dokumen		8 Dokumen				1 Dokumen		-		-		-		1 Dokumen		9 Dokumen		225.00%	
6.01.03.2.01.002					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan [3282]				78,860				266.209		39.900		-		-		-		39.900		39.900		50,60%
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun [4975]			4 Rekomendasi		4 Rekomendasi				0 Rekomendasi		-		-		-		0 Rekomendasi		4 Rekomendasi		100.00%	
6.01.03.2.01.001					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan [1564]				443,240				266.209		43.900		-		-		-		43.900		43.900		9,90%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		
							Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun [4970]	4 Re ko me nda si		4 Reko mend asi				1 Reko mend asi			-		-		-		1 Reko mend asi		5 Reko mend asi		100.0 0%	
6.01.03 .2.02						Pendampingan dan Asistensi			605,701				1,788,654		190,500		-		-		-			190,500		190,500		31.45%
							Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas [1953]	49 Kali		95 Kali				3 Kali		-		-		-			3 Kali		98 Kali		200.00%	
							Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah [801]	65 Lapora n		60 Laporan				0 Laporan		-		-		-			0 Laporan		60 Laporan		92.31%	
6.01.03 .2.02.0 003						Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegaha n dan Pemberant asan			56,261				632.823		41.900		-		-		-			41.900		41.900		74,47%



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10	11	12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%				
						Korupsi [3289]																					
						Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi [4979]	25 Kegiatan		25 Kegiatan			3 Kegiatan	-	-	-	-	3 Kegiatan		28 Kegiatan			100.00%					
6.01.03.2.02.0004						Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas [3290]		36,045			339.181		41.900	-	-	-		41.900		41.900			116,24%				
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas [4980]	14 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah			0 Perangkat Daerah	-	-	-	-	0 Perangkat Daerah		10 Perangkat Daerah			71.43%					
6.01.03.2.02.0002						Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi [3288]		70,353			471.641		45.200	-	-	-		45.200		45.200			64,25%				



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**



Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja Anggaran Renja PD Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12 = 8 + 9 + 10 + 11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%	
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi [4978]	10 Perangkat Daerah		60 Perangkat Daerah	10 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		-		-		-		0 Perangkat Daerah		60 Perangkat Daerah			600.00%	
6.01.03 .2.02.0 001						Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah [1565]		443,042				345.009		61.500		-		-		-		61.500		61.500		13,88%
						Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah [4971]	65 Perangkat Daerah		60 Perangkat Daerah	65 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah		-		-		-		0 Perangkat Daerah		60 Perangkat Daerah			92.31%	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan jangka menengah, serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan, maka disusun program-program Inspektorat yang akan dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Penyusunan program Inspektorat dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD serta mengacu pada tujuan dan sasaran Inspektorat;
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah;
3. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Inspektorat.

Program berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Inspektorat merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Berikut perincian program, kegiatan, dan sub kegiatan Inspektorat Kota Surabaya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Kegiatan:



a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan:

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Kegiatan:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Sub Kegiatan:

- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
- Reviu Laporan Kinerja
- Reviu Laporan Keuangan
- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

Sub Kegiatan:

- Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
- Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan, dan Asistensi

Kegiatan:



a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan

Sub Kegiatan:

- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan

b. Pendampingan dan Asistensi

Sub Kegiatan:

- Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Program, kegiatan, serta sub kegiatan di atas dirumuskan dengan indikator, target, dan pendanaan agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran PD. Untuk lebih jelasnya, indikator, target, serta pagu indikatif tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini:





Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	27,047,086,868	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	100 %	27,037,932,124	
	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	24,441,629,500	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	25,360,144,435	
	6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	24,441,629,500	40 Orang/bulan 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/bulan	25,360,144,435	
	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	712,326,943	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100 %	210,723,052	
	6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	712,326,943	2 Paket 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	210,723,052	
	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,893,130,425	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1,467,064,637	



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,893,130,425	12 Laporan 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,467,064,637	
2	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100 %	2,418,016,900	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		Pemenuhan rekomendasi pengawasan eksternal yang difasilitasi	100 %	2,344,095,000	
			Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %				Persentase penanganan kasus pengawasan dengan tujuan tertentu	100 %		
			Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100 %				Persentase rekomendasi pengawasan internal yang ditindaklanjuti Perangkat Daerah	100 %		
	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah dokumen hasil revidi laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	1,526,862,100	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal		Jumlah dokumen hasil revidi laporan kinerja dan keuangan	17 Dokumen	1,478,950,000	
			Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi				Jumlah hasil pemeriksaan BPK RI dan Inspektorat Kota Surabaya yang ditindaklanjuti oleh PD dan dilakukan monev	20 Rekomendasi		
			Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga				Jumlah lembaga yang dilakukan pengawasan internal	65 lembaga		



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	384,379,100	65 Laporan	6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	65 Laporan	370,400,000	
	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	340,348,000	10 Laporan	6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	10 Laporan	328,175,000	
	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	422,240,000	7 Laporan	6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	7 Laporan	412,175,000	
	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	379,895,000	20 Dokumen	6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	20 Dokumen	368,200,000	
	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu		Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	891,154,800	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan dengan tujuan tertentu	20 lembaga	865,145,000	
	6.01.02.2.02.0002 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	314,326,000	5 Laporan	6.01.02.2.02.0002 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan	304,400,000	
	6.01.02.2.02.0001 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan	20 Laporan	576,828,800	20 Laporan	6.01.02.2.02.0001 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	20 Laporan	560,745,000	



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Dengan Tujuan Tertentu								
3	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100 %	2,321,071,488	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait reformasi birokrasi	100 %	2,262,120,000	
			Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100 %				Persentase PD yang dilakukan pendampingan dan asistensi terkait urusan pemerintahan daerah	100 %		
			Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %				Persentase rumusan kebijakan bidang pengawasan yang ditindaklanjuti	100 %		
	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	5,32,417,600	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan		Jumlah Kebijakan teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan yang dirumuskan	4 dokumen	514,800,000	
	6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	266,208,800	4 Rekomendasi 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	257,400,000	
	6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas	4 Rekomendasi	266,208,800	4 Rekomendasi 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Inspektorat	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	4 Rekomendasi	257,400,000	



**RENCANA KERJA
INSPEKTORAT
TAHUN 2025**



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
			Pengawasan yang Disusun								
	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	47 Kali	1,788,653,888	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		Jumlah frekuensi yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Reformasi Birokrasi, Pemberantasan Korupsi dan Penegakan Integritas	47 Kali	1,747,320,000	
			Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan				Jumlah laporan yang dihasilkan dalam hal pendampingan dan asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 Laporan		
	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah	345,008,800	65 perangkat daerah	6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	65 perangkat daerah	334,850,000
	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	471,641,000	10 perangkat daerah	6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	10 perangkat daerah	460,760,000
	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi,	25 Kegiatan	632,822,700	25 Kegiatan	6.01.03.2.02.0003 Koordinasi,	Inspektorat	Jumlah Kegiatan Koordinasi,	25 Kegiatan	622,810,000



RENCANA KERJA INSPEKTORAT TAHUN 2025



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi					Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			
	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	339,181,388	12 perangkat daerah	6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	12 perangkat daerah	328,900,000	





BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Inspektorat pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Inspektorat Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 10 Juni 2025

Inspektur
Kota Surabaya



Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.

Pembina Utama Madya / IV/d
196908091995011002